



TAJUK RENCANA

Mewujudkan Yogya Kota Wisata Aman

HARI-HARI ini pemudik sudah mulai berdatangan. Mereka adalah kelompok yang bisa mendahului mudik sebagaimana dianjurkan Presiden Jokowi, agar tidak macet di jalanan. Meski puncak mudik tetap diprediksi akhir April mendatang.

Di tengah kesiapan menghadapi pemudik lebaran, beberapa waktu lalu serangkaian kasus kekerasan jalanan remaja yang akrab disebut *kiithih* telah mengguncang rasa kenyamanan warga Yogya. Data Babinkamtibmas Polda DIY yang diungkap Kasubdit AKBP Sinungwati SH MH dalam seminar di Aptisi di STIPfam (18/4), hingga Maret 2022 telah terdapat 19 kasus, 6 kejadian di Kota Yogya dan 13 di Sleman. Angka yang sangat luar biasa selama caturwulan pertama 2022. Karena tahun 2021 selama setahun terjadi 46 kasus di DIY dan 16 di Kota Yogya.

Realita yang mendapat perhatian serius Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah V yang mengkhawatirkan akan berdampak bagi masuknya calon mahasiswa ke DIY. Apalagi dalam realita, sudah ada orang tua yang menarik anaknya untuk tidak jadi berkuliah di DIY. (KR, 19/4). Sebuah dampak yang dikhawatirkan bagi masa depan Yogya yang berpredikat Kota Pendidikan.

Tentu kekhawatiran tidak hanya milik Aptisi, ketika *kiithih* merajalela kembali. Menyandang predikat sebagai Kota Wisata dan mulai berdatangnya pemudik membuat pemerintah kota menerjunkan Tim Penanganan Aduan dan Informasi Yogya. Menurut Walikota Haryadi Suyuti ketika Apel Siaga TNI/Polri Jumat lalu, penerjunan tim sebagai bentuk tekad dan tanggungjawab bersama di antara pemangku kebijakan beserta segenap elemen masyarakat. Tentu, untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke Yogya. Serta mengukuhkan Kota Yogya sebagai kota

wisata aman, nyaman dan terpercaya. (KR, 23/4).

Walikota Yogya memahami terjadinya serangkaian kasus *kiithih* – meski ada yang terjadi di wilayah kabupaten – sebagai alarm yang harus diperhatikan. Menurutnya, potensi kerawanan memang mungkin terjadi. Jalanan macet memudahkan terjadinya gesekan sosial. Dan ini tentu sangat dikhawatirkan banyak pihak.

Gubernur-DIY selain mengeluarkan surat edaran untuk bupati/walikota juga meminta tindakan hukum tegas kepada para pelaku *kiithih*. Mengingat tanpa tindakan hukum tegas, sejatinya masa depan Yogya yang menyandang pelbagai predikat ini sedang dipertaruhkan. Dan semua elemen harus bergerak agar kasus-kasus yang merusak kenyamanan dan keamanan Yogya bisa dihilangkan. Perlukah belajar dari kasus awal pandemi covid, yang telah 'memulangkan' hampir 70% mahasiswa luar DIY ke asalnya? Peristiwa yang membuat 'hilangnya' belanja puluhan miliar per bulan di DIY.

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ini apakah harus memberlakukan jam malam atau menampilkan pelaku *kiithih* dengan orang tuanya di media seperti diusulkan Rektor UMY Prof Dr Gunawan dalam pertemuan Aptisi? Atau cukup rehabilitasi yang tempatnya justru sudah disiapkan Gubernur DIY di Pundong? Atau seperti covid, *kiithih* dinyatakan sebagai pandemi sehingga semua elemen bergerak menanggulangi?

Yang pasti, mewujudkan Yogya kota wisata aman dan nyaman, perlu waktu panjang. Tidak bisa dilakukan sekejap, sekadar menyambut libur lebaran apalagi menyambut wisatawan saat *peak season*. Namun harus dilakukan upaya berkesinambungan dan harus terus menerus. Karena citra itu tidak terbangun seketika. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005